



STRATEGI PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN DALAM KONDISI PANDEMIC COVID-19

Disampaikan dalam acara Webinar PKN STAN, 13 Juli 2020

OLEH ANGGOTA V BPK / KETUA IPKN
PROF. DR. BAHRULLAH AKBAR, M.B.A, *CIPM.*, *CSFA.*, *CPA.*



AGENDA

- 1 Mandat dan Tugas BPK
- 2 Peta dan Sebaran Covid-19
- 3 Pemeriksaan Laporan Keuangan dan Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
- 4 Strategi Pemeriksaan BPK atas Anggaran Penanganan Covid-19



1

Mandat dan Tugas BPK



MANDAT DAN TUGAS BPK

UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

UU No.15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

AMANDEMEN III

UUD 1945

TUGAS



Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara Lainnya, Bank Indonesia, BUMN, BLU, BUMD, dan lembaga/badan lain yang mengelola keuangan negara



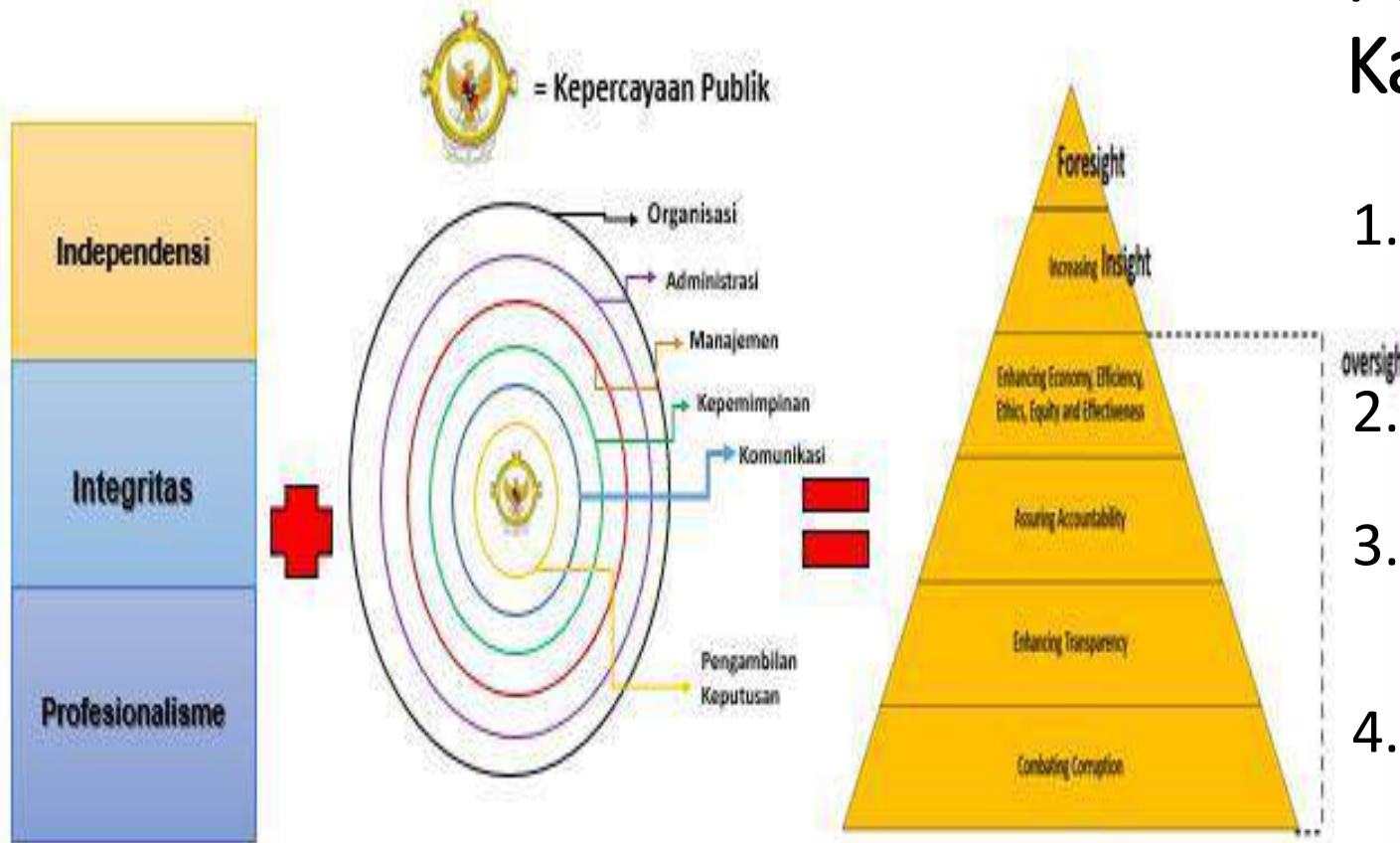
PEMERIKSAAN

Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
(Pasal 1 Angka 1 UU 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara)





Kematangan Organisasi Pemeriksa dan Peran BPK di Kancah Internasional



1. Ketua Auditor IACA / International Anti Corruption Academy (2015)
2. Anggota Panel Auditor Eksternal PBB (2016)
3. Auditor IAEA/(International nternational Atomic Energy Agency). -2017);
4. Eksternal Auditor IMO /international Maritim Organization (2020-2023)
5. Anggota IAAC/Independet Audit Advisory Committe PBB (2020-2022)



PENGAWASAN INTERNAL

PENGAWASAN EKSTERNAL



1

SKB Keputusan Bersama Mendagri 119 dan Menkeu 177 Tahun 2020

DPRD / APIP

Dijen Bina Keuangan Daerah Kemendagri

Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu

2

INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR S 4 TAHUN 2020 (BPKP)

PENGAWASAN DPR

Pasal 74 UU No 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, DPD
Pasal 101 dan Pasal 102 Peraturan Tata Tertib Peraturan DPR RI No 1 Th 2014

**Pembentukan
Tim Pengawas Bencana DPR RI**

Oversight

- UU No. 15 Tahun 2004 dan UU No 15 Tahun 2006: *pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.*
- Melakukan pemeriksaan keuangan negara yang memberikan nilai tambah, pada saat atau pasca penanganan pandemi Covid-19

Insight

- **UU No. 15 Tahun 2006 Pasal 11:** BPK dapat memberikan pendapat kepada lembaga perwakilan & eksekutif
- Memberikan masukan berupa pendapat kepada Pemerintah perihal mitigasi risiko dalam pengelolaan keuangan negara dalam penanganan Covid-19

Foresight

Mengingatkan pemerintah mengenai prinsip dan aturan dasar yang harus dipatuhi dalam penanganan pandemi, terutama terkait pengelolaan keuangan negara melalui pemberian pendapat



2

Peta dan Sebaran Covid-19



COVID-19 DI INDONESIA

INFO TERKINI : Jumlah Orang Dalam Pemantauan (ODP) mencapai **38.702** orang. Pasien Dalam Pengawasan (PDP) mencapai **13.471** orang. Uji PCR sebanyak **562.759** orang sudah diperiksa dan hasil **negatif** sebanyak **496.533** orang. Terkonfirmasi positif COVID-19 mencapai **66.226** orang, **sembuh** **30.785** orang, dan **meninggal dunia** **3.309** orang, yang tersebar di **34 provinsi** dan **456 kabupaten/kota**. Pengujian antigen berbasis **real time Polymerase Chain Reaction (PCR)** dilakukan di seluruh Indonesia. Gunakan masker untuk **lindungi diri dan lindungi sesama**, masker kain sebaiknya dipakai maksimal **4 jam**, **cuci tangan** pakai sabun, **hindari kerumunan** dan **jaga jarak**.

#BersatuLawanCovid19 #CuciTangan #MaskerUntukSemua #JagaJarak #DiRumahAja #TidakMudik

DAERAH TELAH MENETAPKAN

GUGUS TUGAS PENANGANAN

34 Provinsi
496 Kab/Kota

PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR

1 Provinsi
8 Kab/Kota

Sumber: Gugus Tugas COVID-19, 2 Juli 2020

UJI PCR

10.675 ORANG
562.759 SPESIMEN

Sumber: kemkes

LOGISTIK DAN RELAWAN

TOTAL DISTRIBUSI ALMATKES
34.717.251

TERSEBAR DI 34 PROVINSI

TOTAL RELAWAN MEDIS DAN NON MEDIS
30.998

TERSEBAR DI 26 PROVINSI

Sumber: Gugus Tugas COVID-19

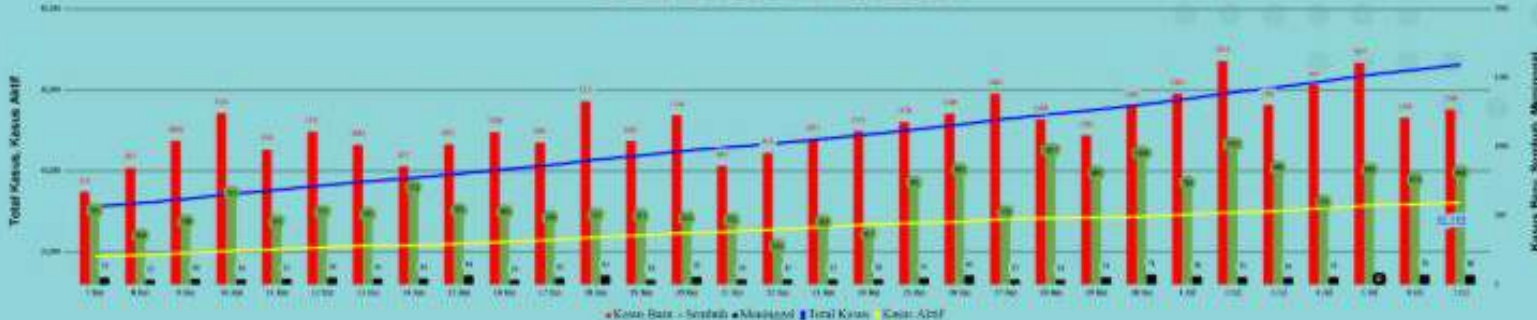
SEBARAN KUMULATIF KASUS AKTIF



FREKUENSI DAERAH JUMLAH KUMULATIF KASUS AKTIF COVID-19
 1-100 101-500 501-2.000 >2.000

JUMLAH KUMULATIF KASUS AKTIF COVID-19
 (JUMLAH KUMULATIF KASUS POSITIF DIKURANGI JUMLAH KUMULATIF KASUS SEMBUH & MENINGGAL)
 2 ORANG POSITIF COVID-19 DALAM PROSES VERIFIKASI

GRAFIK KASUS HARIAN



JUMLAH TERPAPAR COVID-19 DI INDONESIA

Update 7 Juli 2020 Pkl. 12.00 WIB



TERSEBAR DI 34 PROVINSI, 456 KABUPATEN/KOTA

Sumber: Kementerian Kesehatan

UPDATE TERPAPAR COVID-19 DI DUNIA TERSEBAR DI 216 NEGARA DAN WILAYAH/ TERITORIAL

Update 7 Juli 2020 Pkl. 12.00 WIB

No.	Negara	Total Kasus	Meninggal	Jumlah Penduduk	Kematian/1 Juta Penduduk
	Dunia	11.322.790	532.340	7.294.798.139	98
1	Amerika Serikat	2,833,552	129,408	331,002,651	391
2	Brasil	1,577,004	64,265	212,559,417	302
3	India	697,413	19,693	1,380,004,385	14
4	Rusia	687,862	10,296	145,934,462	71
5	Peru	299,080	10,412	32,971,854	316
6	Chili	295,532	6,308	19,116,201	330
7	Inggris	285,420	44,220	67,886,011	651
8	Meksiko	252,165	30,366	128,932,753	236
9	Spanyol	250,545	28,385	46,754,778	607
10	Italia	241,611	34,861	60,461,826	577
26	Indonesia	66,226	3,309	269,603,400	12

Sumber: World Health Organization (WHO), worldometers.info (UN Population Division), BPS

DANA YANG MASUK

REKENING DALAM NEGERI

Rp. 55 M

REKENING LUAR NEGERI

Rp. 104,87 M

DONASI

Rp. 77,2 M

TOTAL Rp. 237 M

Sumber: Gugus Tugas COVID-19 7 Juli 2020

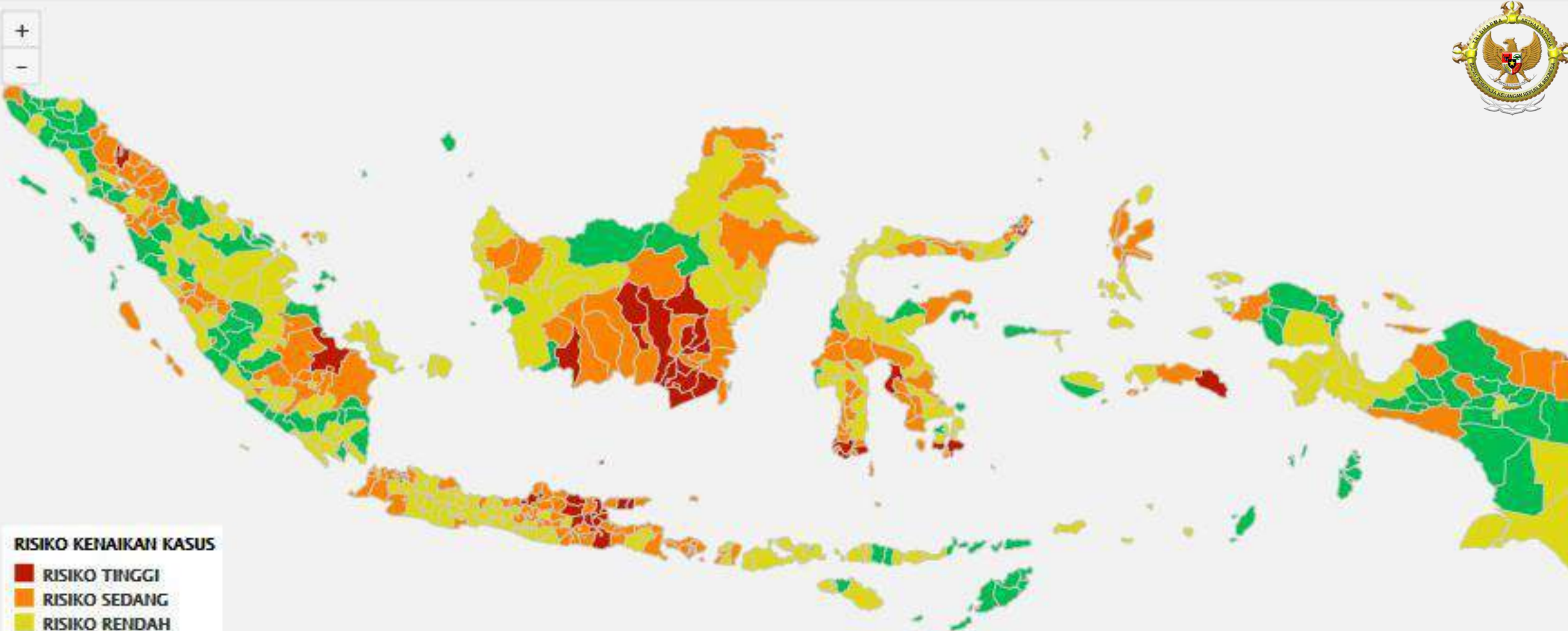


INFORMASI COVID-19

SITUS RESMI
www.covid19.go.id



No : 146/U84/1/...



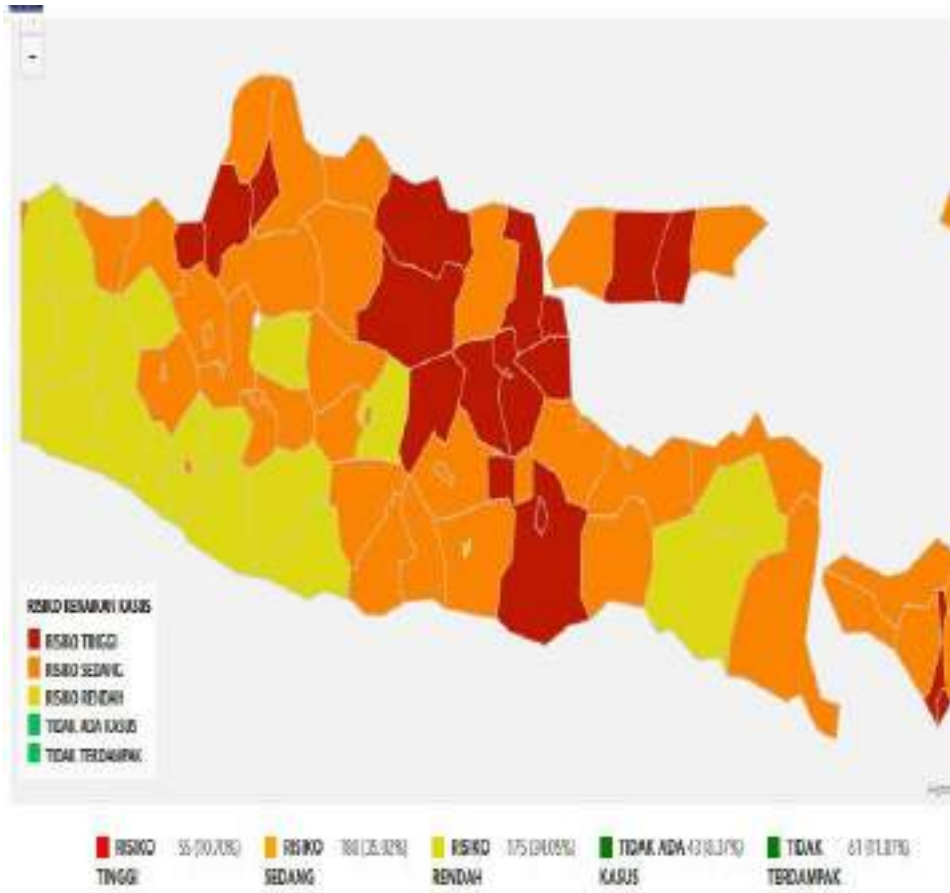
RISIKO KENAIKAN KASUS
■ RISIKO TINGGI
■ RISIKO SEDANG
■ RISIKO RENDAH
■ TIDAK ADA KASUS
■ TIDAK TERDAMPAK

Highcharts.com

■ RISIKO TINGGI	55 (10.70%)	■ RISIKO SEDANG	180 (35.02%)	■ RISIKO RENDAH	175 (34.05%)	■ TIDAK ADA KASUS	43 (8.37%)	■ TIDAK TERDAMPAK	61 (11.87%)
-----------------	-------------	-----------------	--------------	-----------------	--------------	-------------------	------------	-------------------	-------------



Peta Risiko



JOMBANG	RISKO TINGGI
MADIUN	RISKO RENDAH
SAMPUNG	RISKO TINGGI
DIMASASARI	RISKO TINGGI
KOTA PROBOLINGGO	RISKO SEDANG
BONEDWOSO	RISKO RENDAH
MAGETAN	RISKO SEDANG
NGAWI	RISKO SEDANG
GRESIK	RISKO TINGGI
KOTA KEDIRI	RISKO SEDANG
KOTA MALANG	RISKO TINGGI
PONOROGO	RISKO SEDANG
TRENGGALING	RISKO SEDANG
BAKURWANGI	RISKO SEDANG
PASURUAN	RISKO SEDANG
TIGAYAN	RISKO RENDAH
KEDIRI	RISKO SEDANG
LUMAJANG	RISKO SEDANG
MOLONGDO	RISKO TINGGI
TIRUWATI	RISKO TINGGI
LAMONGAN	RISKO SEDANG
KOTA BLEDIS	RISKO RENDAH
KOTA MOJOKERTO	RISKO TINGGI
KOTA MACHULI	RISKO SEDANG

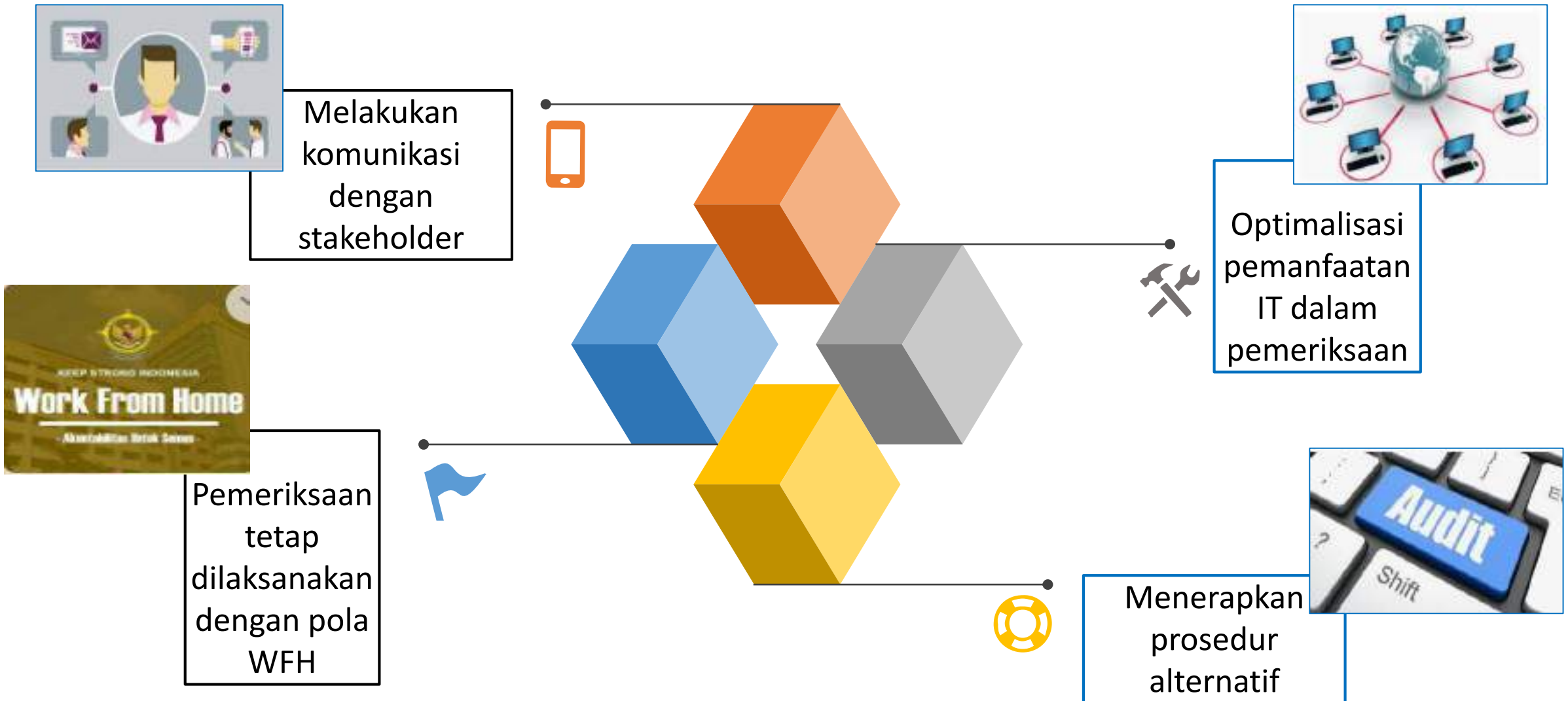
KOTA BATU	RISKO SEDANG
BOJONEGORO	RISKO TINGGI
RANGKALAN	RISKO SEDANG
SUMENEP	RISKO SEDANG
SITUBONDO	RISKO SEDANG
PROBOLINGGO	RISKO SEDANG
NGANJUK	RISKO TINGGI
KOTA SURABAYA	RISKO TINGGI
TRENGGALEK	RISKO SEDANG
BLITAR	RISKO SEDANG
MALANG	RISKO TINGGI
JEMBER	RISKO RENDAH
GEOCARJO	RISKO TINGGI
KOTA PASURUAN	RISKO SEDANG



3

Pemeriksaan Laporan Keuangan dan Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pemeriksaan dalam kondisi pandemik Covid-19



PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN



Independensi
Integritas
Profesionalisme

Perencanaan

Pelaksanaan

Pelaporan

Pemantauan TL



Pemeriksaan Laporan Keuangan di tengah Pandemic Covid-19

Strengths

1. Pemeriksaan Pendahuluan Telah Selesai dilaksanakan
2. Memanfaatkan Hasil Pemeriksaan PDTT TA 2019 dan Hasil Pemeriksaan LK Tahun sebelumnya (temuan berulang)
3. Menggunakan Tim Audit yg sama dgn thn sebelumnya
4. Dukungan IT di BPK

Opportunities

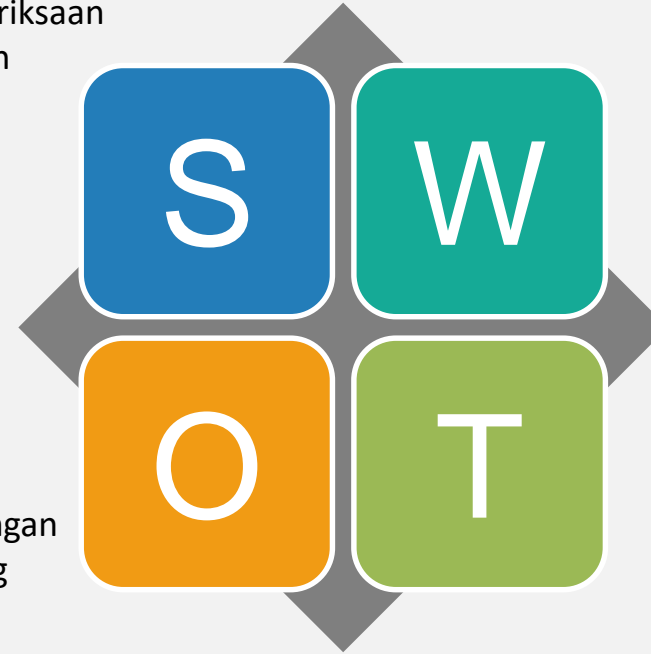
1. Melakukan Pemeriksaan dengan memanfaatkan Media Daring
2. Permintaan dan Pengiriman Dokumen Hard Copy dengan mempertimbangkan Protokol Kesehatan
3. Pengelolaan keuangan Pemerintah berbasis sistem informasi

Weaknesses

1. Pemeriksaan dengan Sistem *Work From Home (WFH)*
2. Tidak dapat melaksanakan beberapa Prosedur Pemeriksaan (a.l. tidak dapat melaksanakan Pemeriksaan Fisik, wawancara langsung, uji fisik dokumen)

Threats

1. Keterbatasan Komunikasi/ Permintaan dokumen/informasi dari Pemda karena Penerapan WFH Pemda
2. Waktu yang dibutuhkan menjadi lebih lama
3. Dukungan Jaringan Internet di Pemda tidak memadai
4. Dokumen tidak semuanya dalam bentuk Soft Copy
5. Validitas, Legalitas dan Keamanan data/informasi dengan menggunakan media daring



SWOT Analysis





STANDAR PEMERIKSAAN PADA MASA DARURAT COVID-19

- ❑ Pemeriksaan tetap mematuhi standar yang telah dipersyaratkan [SPKN, Standar Audit (Standar Profesional Akuntan Publik dan SAP), Panduan Manajemen Pemeriksaan (PMP) dan Juknis pemeriksaan keuangan yang berlaku.
- ❑ Para pemeriksa perlu mempertimbangkan untuk mengembangkan **Prosedur Alternatif** untuk mengumpulkan **bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat** dalam mendukung kesimpulan pemeriksaan.
- ❑ Penerapan Prosedur Alternatif mengoptimalkan penggunaan Teknologi Informasi dan komunikasi, untuk menghindari terjadinya kontak fisik

P R I N S I P

Skeptisisme Profesional

Pemerolehan Bukti yang Cukup dan Tepat

Pengidentifikasian dan Penilaian Risiko Salah Saji Material

Komunikasi dengan Manajemen Entitas dan Pihak yang Terkait

Dokumentasi Pemeriksaan

Pengendalian Mutu Pemeriksaan

Pengujian Substantif

(Prosedur Alternatif)

- ❑ Entry dan exit meeting menggunakan video conference.
- ❑ Pengujian Fisik menggunakan google map live/video conference.
- ❑ Wawancara dan konfirmasi menggunakan video conference atau surat elektronik.
- ❑ Stok opname persediaan menggunakan video conference.
- ❑ Pengujian realisasi belanja perjalanan dinas, Pendapatan Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU), bantuan pemerintah di bidang pendidikan, dan setoran ke kas negara melalui portal e-audit.
- ❑ Pengujian akurasi angka dalam LK dengan detail rincian dalam database menggunakan *audit tools* pengolahan database (ACL, IDEA, SQL server).

Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Pemeriksaan Laporan Keuangan



Penerapan Teknik audit berbantuan komputer (TABK)
(SA 315 par A83, SA 330 par A16)

Pendokumentasian kertas kerja pemeriksaan secara elektronik. (SA 230)

Pemanfaatan aplikasi untuk pengendalian mutu audit atas laporan keuangan. (SA 220)

Optimalisasi Pemanfaatan Online Platform



Penyelesaian Pemeriksaan Semester I 2020

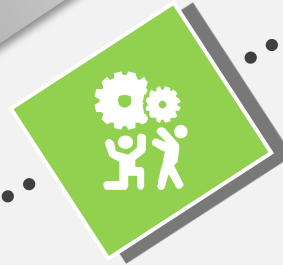
LHP LKPD Tahun 2019

selesai **100%** pada
akhir Juni 2020
Untuk Wilayah Sumatera
dan Jawa



LHP LKKL Tahun 2019

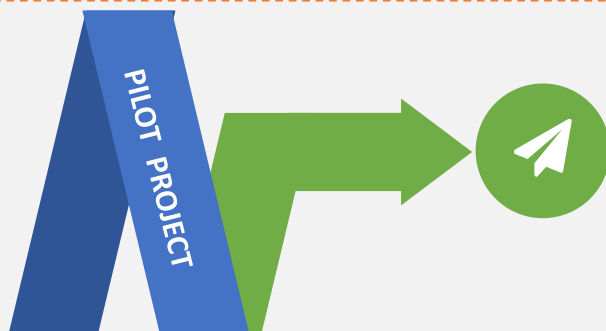
selesai **100%**



**Target
Pemeriksaan
Semester I Tahun
2020 tercapai**



100%



Pemeriksaan kinerja dalam kerangka Pemeriksaan LKPD dengan penekanan pada aspek kinerja tertentu (**LFAR**)

pada **5** perwakilan telah **selesai**



4

Strategi Pemeriksaan BPK atas Anggaran Penanganan Covid-19



Kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam menghadapi dampak wabah Covid-19

01

Perpu No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan.

UU No.2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perpu NO 1/2020

02

Keputusan Presiden Nomor 12 2020 tentang Penerapan Bencana Non Alam Penyebab Covid-19 Sebagai Bencana Nasional

03

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanggulangan Covid-19

04

Permendagri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Covid-19 di lingkungan Pemerintah Daerah

05

Inmendagri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Covid-19 di lingkungan Pemerintah Daerah

06

Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Mendagri Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 117/KMK.07/2020 tentang percepatan penyesuaian APBD TA 2020 dalam rangka penanganan Covid-19, serta pengamanan daya beli masyarakat dan Perekonomian Nasional.

07

Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor S-247/MK.07/2020 tentang penundaan DAK Fisik selama Covid-19

08

KMK Nomor 6/KM.7/2020 tentang Refocusing DAK Fisik Bidang Kesehatan dan DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

09

PMK tentang tentang Penyaluran dan Penggunaan DBH, DAU, dan DID TA. 2020 dalam rangka Penanggulangan Corona Virus Disease 2019(COVID-19)

10

Regulasi daerah terkait dengan peraturan perundangan yang telah ditetapkan

Risiko dan Dampak Pada Restrukturisasi dan Pengelolaan APBD



Perencanaan Anggaran



APBD harus disesuaikan dengan dokumen perencanaan anggaran sesuai dengan kebutuhan penganggulanan Covid-19.

Asumsi penyusunan APBD 2020 sudah tidak relevan.

UU No 15 Tahun 2004

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung

Jawab Keuangan Negara

Ketidakmampuan Keuangan



Ketidakmampuan keuangan daerah dalam menanggulangi belanja yang meningkat

Lemahnya Analisis Ekonomi



Ketidaksiapan analisis ekonomi dalam perubahan anggaran yang berdampak pada potensi gagal bayar di akhir tahun anggaran (karena kesalahan estimasi anggaran pendapatan dan belanja)

Dampak terhadap Outup



Risiko terdapat banyak KDP atas pekerjaan fisik yang dihentikan pelaksanaannya;

Potensi Defisit anggaran pemda.

STRATEGI PEMERIKSAAN



AUDIT

Comprehensive Audit –
gabungan tujuan dari
ketiga jenis pemeriksaan



KEUANGAN

Memberikan perhatian pada pergeseran anggaran dalam APBN dan APBD tahun 2020 yang dialokasikan untuk penanganan COVID-19.



KINERJA

Dilakukan terhadap program/kegiatan penanganan pandemi yang dilakukan oleh pemerintah, bertujuan untuk menilai efektivitas program.

PDTT

berfokus pada kepatuhan dan pengendalian internal dalam penggunaan keuangan negara untuk menangani COVID-19, termasuk pemeriksaan investigasi.

RENCANA PEMERIKSAAN BPK PADA SEMESTER II TAHUN 2020



1 Pemeriksaan atas Refocusing Anggaran Pemda untuk Penanggulangan Covid-19



Belanja Kegiatan

Belanja Hibah/Bansos

Belanja BTT

1

Penanganan Kesehatan

2

Penanganan Dampak Ekonomi

3

Pengadaan Jaringan Pengaman Nasional

2 *Time Frame : Juli – Des 2020*

3 *Monitoring + IT Audit*

ALOKASI ANGGARAN PENANGANAN COVID 19 DALAM APBD PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA TA 2020

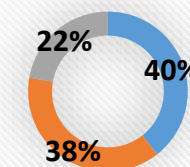


Sumber data :
Kemendagri, 25 Juni 2020

URAIAN	APBD PASCA RELOKASI	BELANJA BIDANG KESEHATAN	LAPORAN PENCEGAHAN DAN/ATAU PENANGANAN COVID-19						
			%	PENYEDIAAN JARING PENGAMANAN SOSIAL/ SOCIAL SAFETY NET	%	PENANGANAN DAMPAK EKONOMI	%	TOTAL	%
TOTAL PROVINSI se INDONESIA	332.932,70	11.355,50	3,41%	15.729,00	4,72%	9.463,99	2,84%	36.548,49	10,98%
TOTAL KABUPATEN se INDONESIA	632.164,95	14.467,11	2,29%	9.361,63	1,48%	5.650,54	0,89%	29.479,27	4,66%
TOTAL KOTA se INDONESIA	142.653,60	3.276,19	2,30%	3.234,23	2,27%	1.301,97	0,91%	7.812,39	5,48%
TOTAL KABUPATEN/KOTA se INDONESIA	774.818,55	17.743,30	2,29%	12.595,86	1,63%	6.952,50	0,90%	37.291,66	4,81%
TOTAL PROVINSI + KAB/KOTA se INDONESIA	1.107.751,26	29.098,80	2,63%	28.324,85	2,56%	16.416,49	1,48%	73.840,15	6,67%

BIDANG PENANGANAN COVID-19	JUMLAH	%
BELANJA BIDANG KESEHATAN	29.098,80	39,41%
PENYEDIAAN JARING PENGAMANAN SOSIAL/ SOCIAL SAFETY NET	28.324,85	38,36%
PENANGANAN DAMPAK EKONOMI	16.416,49	22,23%
TOTAL	73.840,15	

Proporsi Dana Penanggulangan Covid-19



■ BELANJA BIDANG KESEHATAN
■ PENYEDIAAN JARING PENGAMANAN SOSIAL/ SOCIAL SAFETY NET
■ PENANGANAN DAMPAK EKONOMI

TOTAL APBD 2020 sebelum Realokasi : Rp1.298,50 Triliun

TOTAL APBD 2020 setelah Realokasi : Rp982,719 Triliun

**TOTAL ALOKASI ANGGARAN PENANGANAN COVID-19 : Rp73,84 Triliun [6,67%
dari Alokasi APBD PASCA REALOKASI ANGGARAN]**

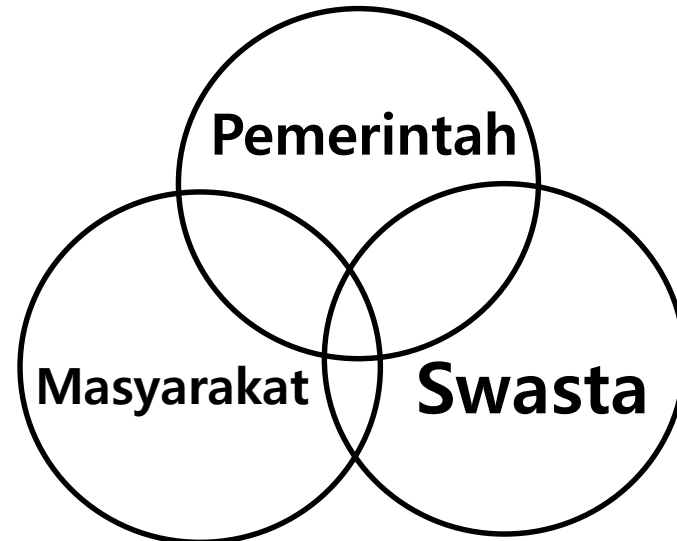
INTERNALITAS *GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE*



**Komitmen dan Kerja Sama
DPRD dan Kepala Daerah**

**Perda maupun Perkada
belum mengatur pengelo-
laan pendapatan dalam
kondisi Covid**

**Kualitas Pelayanan
Publik**



**Dukungan Ketersediaan
Jaringan dan Sistem Informasi
Yang Memadai**

**Komunikasi dan Koordinasi
Antar SKPD**

**Ketersediaan sumber daya
finansial**

Komitmen Pihak Ketiga



EKSTERNALITAS

The Whole Of
Government

Tantangan Kolaborasi

1

Perubahan Peraturan Pengelolaan Penerimaan dari Pemerintah Pusat

5

Perda maupun Perkada belum mengatur pengelolaan PAD dalam kondisi Covid

2

Koordinasi dengan dan atau antar Kementerian Teknis

6

Koordinasi Antar Instansi Dalam Pengawasan Pengelolaan Penerimaan

3

Optimalisasi Pendapatan versus Pelayanan kepada Wajib Pajak/Retribusi

7

Adanya persyaratan pengajuan pencairan Dana Bagi Hasil

4

Batas waktu pengajuan dan pencairan Dana Transfer dan Dana Desa

8

Proses Pengajuan Penerimaan Klaim BPJS



TERIMA KASIH

.Slide & data diolah dari berbagai sumber.